

COLLABORATIVE GOVERNANCE GUNA EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN KELURAHAN SENGKUANG KECAMATAN SINTANG

Jhony Fredy Hahury

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: jf28hahury@gmail.com

Abstract: *his study aims to analyse collaborative governance for government effectiveness in Sengkuang Village, Sintang District. By using qualitative descriptive method. The results showed that collaborative governance in Sengkuang Village has a positive impact on government effectiveness. The active involvement of the community, in this case community leaders, Karang Taruna, RT / RW and other parties, is certainly able to strengthen governance through village deliberations, meetings, and musrenbang as a commitment to the success of governance. The effectiveness and quality of public services help improve government efficiency and accountability to strengthen good and responsible governance. The importance of the role of collaborative governance in improving the effectiveness of village governance, as a collaboration that creates public trust in the village government.*

Keywords: *Collaborative Governance; Government Effectiveness.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* guna efektivitas pemerintahan di Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Sintang. Dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* di Kelurahan Sengkuang memberikan dampak positif terhadap efektivitas pemerintahan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam hal ini tokoh masyarakat, Karang Taruna, RT/RW dan pihak lain tentunya mampu menguatkan tata kelola pemerintahan melalui musyawarah kelurahan, rapat, serta musrenbang sebagai komitmen dalam keberhasilan pemerintahan. Efektivitas dan kualitas layanan publik membantu meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pemerintahan menjadi penguatan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pentingnya peran *collaborative governance* dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan kelurahan, sebagai kolaborasi yang muaranya menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan kelurahan.

Kata Kunci : *Collaborative Governance; Efektivitas Pemerintahan.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan kelurahan merupakan unit pemerintahan dibawah pemerintahan kecamatan yang menjadi sentral dalam pelayanan publik dan melaksanakan pemerintahan yang secara pengelolaannya melibatkan segenap aparatur pemerintahan ditingkat Kelurahan. Kelurahan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah

yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Pemerintahan kelurahan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Efektivitas tata kelola pemerintahan kelurahan menjadi faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif,

transparan, dan akuntabel. Namun, tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sinergi antar sumber daya seringkali menghambat optimalisasi kinerja pemerintahan kelurahan.

Dalam konteks ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan sebagai kerangka kerja untuk mengatasi tantangan tersebut. *Collaborative* atau kolaboratif berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Menurut Camarinho-Matos dan Afsarmanesh (2008) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses berbagi informasi, sumber daya, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Rahardjo (2010:232) bahwa kolaborasi berkaitan dengan adanya aransemen kerjasama yang jelas, kepercayaan yang diimbangi dengan komitmen, struktur dan kapasitas kelembagaan. Artinya kolaborasi dapat menciptakan kerjasama yang dengan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, dengan keterpaduan pada semua aspek organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas di atas, maka dapat dikatakan kolaborasi adalah proses dinamis yang melibatkan kerja sama aktif untuk mencapai tujuan bersama. Pentingnya sinergi, komunikasi, dan komitmen dalam proses kolaboratif. Dalam konteks yang lebih luas, kolaborasi tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu atau kelompok, tetapi juga menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif.

Tujuan Pemerintahan yang

kolaboratif pasti menghadirkan sebuah kerja sama yang bersinergi dengan orang lain, kelompok maupun Lembaga. Kemampuan suatu negara mencapai tujuan sangat bergantung pada kualitas tata pemerintahan (*governance*) yaitu pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta, masyarakat (Anggara, 2014:201). Menurut Koiman (2009) mendefinisikan *governance* sebagai proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya Sadjijono (2007) mendefinisikan *governance* sebagai kegiatan lembaga pemerintah yang dijalankan untuk mewujudkan cita-cita negara.

Berdasarkan Batasan definitif di atas, *governance* dapat disimpulkan bahwa proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan mekanisme dalam pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan. Dengan memahami komponen dan tantangan *governance*, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menciptakan tata kelola yang lebih baik untuk masa depan.

Kolaborasi sebagai konsep relasi antara organisasi, pemerintah, aliansi strategis, dan jaringan multi organisasi. Hal tersebut menurut Ansell dan Gash (2008:544) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui interaksi langsung, deliberasi, dan berbagi tanggung jawab. Melalui pendekatan ini, pemerintahan kelurahan dapat mendorong partisipasi multipihak dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program-programnya.

Collaborative Governance hadir saat era paradigma *governance*, di mana pemerintah sedang menghadapi peningkatan kompleksitas masalah seiring dengan berkembangnya masyarakat. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) Dalam "*An Integrative Framework for Collaborative Governance*," para penulis ini menggambarkan *collaborative governance* sebagai "proses dan struktur yang memungkinkan aktor lintas sektoral untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama melalui dialog, pengambilan keputusan kolektif, dan tindakan bersama."

Berkaitan hal tersebut *Collaborative governance* sebagai pengaturan pengelolaan pemerintahan di mana proses penyusunan kebijakan bersama membuat institusi publik bekerja sama dengan aktor non-pemerintah dalam merancang atau menjalankan kebijakan publik, mengurus program, atau aset publik. Oleh karena itu, kelurahan sebagai sentral birokrasi pelayanan publik dituntut untuk melakukan kerja-kerja pemerintahan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang baik.

Berkaitan dengan pemahaman di atas, Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang merupakan Kelurahan yang berkembang karena keberadaannya termasuk dalam wilayah Kota Sintang Propinsi Kalimantan Barat, dimana perkembangan masyarakat yang ada sudah tentu memerlukan sebuah

kualitas layanan harus dipenuhi. Sebuah kolaborasi tentunya pemerintah melibatkan partisipasi publik yang menjadi faktor penting dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan Kelurahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kelurahan sebagai sentra pelayanan bagi masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik serta efisien kepada warga masyarakat. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan kelurahan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Perubahan yang terarah dengan meningkatkan efektivitas, kualitas pelayanan, dan partisipasi. Kinerja perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus diikuti sikap, perilaku dan kesantunan agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kolaborasi tata kelola pemerintahan dalam efektivitas Pemerintahan Kelurahan Sengkuang Kecamatan Sintang. Melalui penerapan pendekatan *collaborative governance* diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik dalam tata kelola pemerintahan kelurahan yang mengacu kepada efektivitas pemerintahan, Kualitas pelayanan, dan akuntabilitas.

Tata kelola pemerintahan (*governance*) mengacu pada proses dan

mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi sumber daya publik (Rhodes, 1996:652). Prinsip utama tata kelola meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan (UNDP, 1997:23). Pada tingkat kelurahan, tata kelola mencakup fungsi-fungsi administratif, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Seyogyanya, tata kelola pemerintahan kelurahan seringkali dihadapkan pada berbagai masalah, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya sinergi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* hadir untuk meningkatkan efektivitas tata kelola kelurahan.

Efektivitas pemerintahan merupakan indikator penting yang menunjukkan sejauh mana pemerintah dapat mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana Weber dalam Mas'ud Said (2010) menekankan pentingnya birokrasi yang rasional sebagai fondasi pemerintahan yang efektif. Birokrasi yang ideal menurut Weber dalam Mas'ud Said (2010:2) memiliki hierarki yang jelas, pembagian kerja yang sistematis, dan aturan yang terstandar.

Efektivitas merupakan sebuah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sejalan dengan itu, Mahmudi (2010:86) menjelaskan bahwa efektivitas adalah "hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan output) terhadap

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Efektivitas menitik beratkan pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan sebagai pengeluaran yang bijaksana.

Mengukur efektivitas bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung dari siapa yang menafsirkan dan mengevaluasinya. Menurut Duncan dalam Steers (2020:53) mengungkapkan ada tiga dimensi dalam mengukur efektivitas, yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dalam pencapaian tujuan seluruh usaha pencapaian tujuan harus dilihat sebagai suatu proses.

Efektifitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

Dalam konteks pemerintahan, efektivitas berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, memberdayakan

masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah lokal.

Menurut Mahsun (2006:75), terdapat beberapa dimensi utama dalam efektivitas pemerintahan:

1. Kualitas Pelayanan: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah.
2. Efisiensi Operasional: Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
3. Ketepatan Sasaran: Kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Penelitian oleh Denhardt dan Denhardt (2015:115) menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan dapat ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif, di mana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Menurut Putra (2019:47), beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pemerintahan meliputi:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia: Kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. Ketersediaan Sumber Daya: Dukungan anggaran, infrastruktur, dan teknologi.
3. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

4. Kepemimpinan: Peran pemimpin dalam mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan program pemerintahan.

Pemerintahan yang kolaboratif akan menghasilkan kualitas layanan yang prima bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang profesional. Kualitas adalah bentuk-bentuk istimewa dari suatu produksi atau pelayanan yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan masyarakat.

Gaspers sebagaimana dikutip Mukarom dan Laksana (2018:105) pada dasarnya kualitas terdiri dari : 1) sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk; 2) segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Selanjutnya pelayanan publik menurut Dwiyanto (2006:141) adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga penggunanya.

Pemberian pelayanan publik yang dilakukan oleh pada pemerintah, menurut Lembaga Administrasi Negara (2004:391) hakekat pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan layanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sehingga indikator kualitas pelayanan, terdiri :

1. *Tangibles*. Penampilan pegawai dan sarana fisik lainnya : peralatan yang menunjang;
2. *Reliability*. Kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya;
3. *Responsiveness*. Keinginan terhadap melayani pelanggan dengan cepat;
4. *Assurance*. Ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan;
5. *Emphaty*. Ditandai tingkat kemauan mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen (Mukarom dan Laksana, 2018:108).

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat. Tantangan birokrasi sebagai pelayanan rakyat mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan meningkat kehidupan rakyat yang semakin baik (Kurniawan, 2005:4). Oleh karena itu, setiap pemberian pelayanan yang dilakukan secara akuntabel oleh semua aparatur. Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah bagi pejabat adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai akuntabilitas publik.

Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Bovens (2007:450) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan di mana seseorang atau entitas memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang telah diambil kepada pihak lain yang memiliki otoritas.

Uraian definitif di atas tergambar pentingnya akuntabilitas pada sektor publik, karena dalam kinerja pemerintahan, yang merupakan hasil dari kegiatan/pogram yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur untuk kepentingan publik.

Hubungannya dengan hal tersebut, Menurut Sedarmayanti (2011:98), akuntabilitas dalam pemerintahan memiliki beberapa dimensi, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Peraturan: Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan standar yang berlaku.
2. Akuntabilitas Keuangan: Pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai dengan prosedur.
3. Akuntabilitas Kinerja: Kemampuan untuk menunjukkan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Akuntabilitas Sosial: Respons pemerintah terhadap aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Berdasarkan World Bank (1994: 21), terdapat prinsip-prinsip utama dalam akuntabilitas pemerintahan:

1. *Transparansi*: Penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. *Responsivitas*: Kemampuan pemerintah untuk menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat.
3. *Partisipasi*: Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

4. Pengawasan dan Evaluasi: Pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan.

Efektivitas dan akuntabilitas memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam konteks pemerintahan. Pemerintahan yang efektif tanpa akuntabilitas dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, sementara akuntabilitas tanpa efektivitas dapat menghasilkan birokrasi yang lambat dan tidak efisien (Mahsun, 2006: 78).

Sebagaimana Studi oleh Bovens (2007:451) menunjukkan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan cara berikut:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik : Transparansi dan pertanggungjawaban menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
2. Memperbaiki Kinerja: Akuntabilitas mendorong aparat pemerintah untuk bekerja lebih profesional dan efisien.
3. Mencegah Korupsi: Pengawasan yang ketat mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Efektivitas pemerintahan juga dapat memperkuat akuntabilitas. Pemerintah yang efektif cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan laporan yang relevan dan akurat (Denhardt & Denhardt, 2015: 117).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagaimana Sugiyono (2005:20) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Yang menjadi informan penelitian adalah Lurah Sengkuang, Sekretaris Lurah, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Sengkuang, dan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Sengkuang salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Indonesia. Kelurahan Sengkuang adalah hasil pemekaran dari kelurahan Kapuas Kanan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011.

Kelurahan Sengkuang memiliki luas wilayah 9 km² dengan luas wilayah yang digunakan adalah pemukiman penduduk, wilayah pendidikan dan Pasar. Kelurahan Sengkuang terdiri dari lima Rukun tetangga (RT). Secara

administratif batas wilayah Kelurahan Sengkuang adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Rawa Mambok, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Angga Jaya, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ladang.

Berdasarkan data dari Kantor Kelurahan Sengkuang Sintang bahwa jumlah penduduk Kelurahan Sengkuang berjumlah 4.167 orang terdiri dari laki-laki 2.143 dan perempuan 2.024 orang dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.073. Jumlah tersebut sangat banyak, oleh karena itu pemerintah Kelurahan sebagai sentra pelayanan bagi masyarakat harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana agar pelayanan menjadi lebih baik.

Pentingnya membangun efektifitas pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan harapan untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebuah kolaborasi pemerintahan yang baik tentunya diperlukan keterlibatan masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi serta layanan yang berkualitas dan efisiensi pelayanan. Masyarakat merelakan sebagian kepentingannya untuk diserahkan kepada pemerintah melalui aparaturnya memperoleh hak untuk mengatur warga.

Efektivitas pemerintahan kelurahan merupakan indikator penting

dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan kemampuan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, akuntabel dan transparan, yang berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kelurahan Sengkuang sebagaimana melakukan tugas pemerintahan melalui pelayanan sosial, pembangunan dan bantuan-bantuan sosial yang mengarahkan kepada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan salah satu aparatur pemerintahan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga dengan program-program yang sudah disiapkan sehingga diharapkan berjalan dengan efektif. Program yang dilakukan merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah kelurahan yakni pelayanan prima. Salah satu indikator kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan merata menjadi tanda efektivitas pemerintahan.

Efisiensi dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk menghasilkan dampak maksimal. Dan Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah merupakan elemen penting.

Hasil wawancara dijelaskan efektivitas pemerintahan sebagai kemampuan untuk pemerintah kelurahan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan cara mengelola dan mengerjakan tugas-

tugas yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil wawancara diketahui efektivitas pemerintahan adalah salah satu dimensi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan melalui aparaturnya dalam rangka pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan.

Efektifitas merupakan pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa efektivitas pemerintahan sebagai pelaksanaan tugas pekerjaan yang dilakukan baik yang diselenggarakan maupun yang sudah dikerjakan secara efektif. Pekerjaan yang dilakukan harus bertanggung jawab.

Efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Hasil wawancara dengan informan bahwa peran pemerintah kelurahan untuk memberikan perhatian dalam kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat dilakukan secara konsisten sehingga diharapkan dapat meningkatkan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Kelurahan Sengkuang didukung oleh kemampuan teknis aparatur yang cakap sehingga kurang mampu memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut.

Dalam hal ini pemerintahan mempunyai perangkat-perangkat yang sering disebut sebagai jajaran birokrasi yang tentunya mempunyai tugas dan

fungsi dan berpegang teguh pada terwujudnya pencapaian tujuan yang berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diatur, agar terciptanya suatu pelayanan yang efektif diperlukan aparatur yang handal untuk menggerakkan segala kegiatan dalam proses pencapaian tujuan.

Hal ini berarti bahwa seseorang berkewajiban untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam organisasi. Seseorang seharusnya menggunakan kekuatan dan kapasitasnya untuk melakukan pertanggungjawaban kepada apa yang dikerjakan oleh aparatur untuk mematuhi setiap aturan organisasi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa efektivitas itu suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu tugas didalam sebuah organisasi atau instan dalam mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan. Mengacu kepada konsep kolaborasi bahwa upaya yang dilakukan berbabagi pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Hasil wawancara dengan informan bahwa dukungan masyarakat kelurahan Sengkuang dalam kepentingan pemerintahan kelurahan mendapatkan masukan dan saran dari tokoh masyarakat, karang taruna, RT/RW setempat melalui rapat Bersama maupun musrenbang kelurahan guna berkolaborasi untuk pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang efektif dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sengkuang dalam

meningkatkan efektivitas pemerintahan harus didukung dengan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Kelurahan Sengkuang yakni mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional, partisipatif dan responsif. Sedangkan Misinya adalah terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat, mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, efektif dan efisien.

Kolaborasi dalam Efektivitas pemerintahan adalah aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemerintahan pembangunan dalam meningkatkan kinerja pemerintah kelurahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat melalui kegiatan dan layanan pelayanan publik yang efektif guna kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami komponen dan tantangan yang ada, dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintahan kelurahan serta belajar dari praktik terbaik di berbagai daerah sehingga terus meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan, termasuk di tingkat kelurahan. Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Mengacu kepada pendapat (Dwiyanto, 2006) bahwa pelayanan publik harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Pelayanan publik yang efektif juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan mudah diakses. Untuk mengukur kualitas pelayanan publik, dapat digunakan lima indikator, yaitu: *Tangibilitas, Reliabilitas, Responsiveness, Empati, Assurance*. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan secara berkala oleh pemerintah kelurahan. Kualitas pelayanan publik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, seperti: meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas pelayanan publik di kelurahan sangat bergantung pada kompetensi aparatur, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, serta regulasi yang diterapkan. Dengan menerapkan konsep kualitas pelayanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan warga kelurahan dapat meningkatkan efektivitas layanan serta membangun kepercayaan publik.

Dengan efektivitas pelayanan pemerintahan guna mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang efektif dapat diukur dari sejauh mana masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Pelayanan Pemerintahan, yaitu pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, Pajak, dan pelayanan identitas kependudukan lainnya.

Sebagaimana Dwiyanto (2006), pembaharuan pelayanan publik yang diharapkan dapat mendorong pengembangan praktik *good governance* melalui perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh semua *stakeholders* (pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar), dan Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik *good governance* dapat diterjemahkan secara relative mudah dan nyata melalui pelayanan publik.

Kolaborasi pemerintahan tentunya mendapat dukungan agar menciptakan tata kelola yang inklusif dan demokratis. Suksesnya kolaborasi sangat dilihat pada komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, sebab faktor Pendukung Kolaborasi yang Efektif adalah komunikasi, kepercayaan dan akuntabilitas. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan bahwa komunikasi penting dalam sebuah pemerintahan. Karena bersifat internal dan eksternal yang bisa melibatkan beberapa aktor diluar pemerintahan yang pada akhirnya akan mencapai sebuah akuntabilitas pemerintahan yang bisa dipercaya oleh masyarakat.

Penting dalam membangun hubungan kolaboratif yang kuat harus didukung dengan komitmen dan akuntabilitas aparatur pemerintahan kelurahan. Akuntabilitas pemerintahan layanan di kelurahan bertujuan untuk : Menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, Memastikan dana kelurahan digunakan secara optimal, evaluasi capaian kinerja aparatur, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Hasil wawancara dengan informan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan layanan di kelurahan, di antaranya: menyediakan laporan dana kelurahan, terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan dana kelurahan, informasi melalui spanduk untuk menunjukkan jumlah anggaran dan realisasi kegiatan. Akuntabilitas pemerintahan ini sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil kepada publik atau pihak berwenang.

Tantangan dan kendala efektivitas sert akuntabilitas pemerintahan meliputi : kurangnya informasi atau minim informasi kepada publik. Dan kesadaran masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah masih rendah. Dengan menerapkan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan publik secara lebih bertanggung jawab dan efisien.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan makna kolaborasi mencakup nilai-nilai, prinsip, dan manfaat yang dihasilkannya. Dimensi penting dari kolaborasi adalah performa pemerintahan yang mencapai produktivitas kerja yang efektif. Kolaborasi mendorong pertukaran pengetahuan dan komitmen yang kuat terhadap tujuan bersama, meskipun ada perbedaan-perbedaan kepentingan di antara para pihak. Namun, juga menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan kajian pembahasan penelitian tentang *Collaborative governance* guna efektivitas pemerintahan Sengkuang bahwa tata kelola kolaboratif dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, melalui efektivitas layanan kualitas pelayanan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. *Collaborative governance* memungkinkan warga terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah kelurahan dan kegiatan sosial membantu menciptakan sinergi dalam pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Tata kelola kolaboratif meningkatkan kualitas layanan Publik yang dapat dirasakan oleh warga. Sebab dengan keterbukaan informasi dan memperbaiki sistem akuntabilitas pemerintahan di Kelurahan Sengkuang tentunya mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Saran dalam penelitian ini adalah kolaborasi pemerintahan diperlukan komitmen dan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat agar dipertahankan secara berkesinambungan dalam menguatkan layanan kualitas pelayanan dan akuntabilitas pemerintahan yang dapat diterima oleh publik sehingga dengan komitmen itu dapat menciptakan efektivitas pemerintahan yang sesuai harapan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell dan Gash, (2008). "*Collaborative Governance in Theory and Practice*."

Journal of Public Administration Research and Theory.

Afsarmanesh dan Matos, (2008). *Concept of Collaboration*. USA: IGI Global.

Bovens, M, (2007). *Analysing and Assessing Accountability; A Conceptual Framework*. European Law Journal, Vol. 13, No. 4: 447-468.

Emerson, Nabatchi, & Balogh, (2012). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. Journal of Public Administration Research and Theory.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service : Serving, Not Steering*. New York : Routledge.

Dwiyanto, (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : UGM Press.

Kurniawan, (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

LAN, (2004). *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi Kedua*. Jakarta : LAN

Mahsun, (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE

Mahmudi, (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta : STIE YKPN.

Mas'ud Said, (2010). *Birokrasi Di Negara Birokratis*. Malang : UMM Press.

Mukarom dan Laksana, (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.

Putra, (2019) *Analisis Kebijakan Publik – Neo-Institusionalisme:Teori dan Praktik*. Depok : LPSP3.

Rahardjo, M. (2010). *Strategi Efektif dalam Kolaborasi Tim dan Organisasi*. Bandung : Alfabeta.

- Rhodes, (1996). *The New Governance: Governing Without Government*. *Journal Political Studies*, 44 (4), 652-667.
- Sadjijono, (2007). *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta : Laksbang Presindo.
- Sedarmayani, (2011). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju.
- Steers, Richard. M, (2020). *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- UNDP, (1997). *Human Development Report*. New York : United Nations Development Programme.